ANALISIS SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA PROGRAM SERTIFIKASI DOSEN DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II TAHUN 2020

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

ANDRA NUANSA AGASTA
07011281621087

Konsentrasi Keuangan Negara

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
AGUSTUS 2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA PROGRAM SERTIFIKASI DOSEN DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II TAHUN 2020

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

ANDRA NUANSA AGASTA
07011281621087

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Juni 2020

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM
NIP. 195811191985031003

Pembimbing II

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Program Sertifikasi Dosen di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Tahun 2020"* telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 11 Agustus 2020.

Palembang, 11 Agustus 2020

Ketua

1. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM.
   NIP. 195811191985031003 .....

Anggota

2. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.
   NIP. 198106082008122002 .....

3. Drs. Mardianto, M.Si.
   NIP. 196211251989121001 .....

4. Ermanovida, S.Sos., M.Si.
   NIP. 196911191998032001 .....

Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

LEMBAR PERSEMBAHAN

MOTTO

Maka, jangan sekali-kali membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakan kamu
(Q.S. Fatir: 5)

Dan katakanlah: “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan”
(Q.S. Thaha: 114)

Dan tidak ada kesuksesan bagiku melainkan atas (pertolongan Allah)
(Q.S. Huud: 88)

Ada banyak goresan tinta yang membuatku sadar bahwa manusia adalah entitas sempurna yang dikutuk untuk “bebas”
(Andra N A)

Bismillahirrahmanirrahim, Skripsi ini Saya persembahkan untuk:

- ✓ Bangsa dan Negara
- ✓ Kedua Orangtuaku, Ayahanda Ardianyah dan Ibunda Yuli Indriati
- ✓ Saudaraku, Keluargaku dan Adikku Fariz, Eriq dan Adel
- ✓ Teman-teman Seperjuanganku, Organisasi dan Komunitas
- ✓ Almamaterku
- ✓ Masa depanku

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang analisis penyusunan anggaran berbasis kinerja pada program peningkatan jumlan dosen yang bersertifikasi di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II pada tahun 2020. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pencapaian kinerja pada program peningkatan jumlah dosen yang bersetifikasi pada tahun sebelumnya dan identifikasi masalah terkait perubahan naungan Kementrian yang membawahi lembaga tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 113/P Tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori dari Hager berdasarkan penerapan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip penganggaran berbasis kinerja masih belum sesuai penerapannya, dilihat dari empat aspek, tujuan, ukuran kinerja, kaitan dan akuntabilitas. Proses yang diawali dengan tahap penetapan strategi yang dijelaskan dalam rencana kinerja yang kemudian dituangkan dalam penganggaran, belum sepenuhnya memenuhi prinsip penganggaran berbasis kinerja. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja masih sebatas memenuhi ketentuan yang ada. Saran yang menjadi rekomendasi masukan pada penelitian ini ialah identifikasi lebih lanjut saat penyusunan program kerja perlu dilakukan dan dikaji mendalam dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu adanya ketetapan baku mengenai penyusunan rencana kerja dan perencanaan anggaran biaya dan perumusan ulang kebijakan program kegiatan peningkatan jumlah dosen yang bersertifikasi dengan tepat.

Kata Kunci : Penganggaran Berbasis Kinerja, Perencanaan, Sertifikasi Dosen

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Slamet Widodo, Ms., MM	Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 195811191985031003	NIP. 198108272009121002

Palembang, Agustus 2020
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya,

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This research is discusses about the analysis of performance based budgeting on the Increasing number of certified lecturers at the Higher Education Service Institution Region II in 2020. This research is motivated by an increase in performance on the program Increasing the the number of certified experts in the previous year and supporting the problem of using the Ministry of Ministry oversees institution based on Presidential Decree No. 113/P 2019. This type of data used is primary and secondary data, while data collection technique are carried out through interviews, observations, documentation, and literature studies. This study uses a theory from Hager based on the application of the principle of performance-based budgeting. The results of the study show how the application of the principle of planning-based budgeting is still not in line with its application, viewed in terms of the quadrangle, objectives, performance measured, renewal and accountability. The process that began with the preparation of strategies that were incorporated in performance planning which was then outlined in budgeting. This discrepancy regulates the preparation of the articles of association still limited to the provision of existing provisions. Sugesstions that are discussed in this study in the section that collects fund Work programs that need to be carried out and reviewed within the Ministry of Education and Culture, there need to be standard provisions regarding work plans and budget planning and the formulation of a budget assistance program appropriately.

Keywords: Performance-Based Budgeting, Planning, Lecturer Certification

Advisor I	Advisor II
Prof. Dr. Slamet Widodo, MS., MM	Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 195811191985031003	NIP. 198108272009121002

Palembang, August 2020

Head of Public Administration Department
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University,

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Program Sertifikasi Dosen di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Tahun 2020". Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penyusunan skripsi ini mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak- pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahandaku Ardiansyah dan Ibundaku Yuli Indriati yang selalu mendukung dan memberikan doa serta menjadi pemantik semangat untukku.
2. Bapak Prof. Ir. H.. Anis Sagaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Gatot Budiarto, MS selaku Pembimbing Akademik .
5. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Admnistrasi Publik dan Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mendengar, menginspirasi, dan memberikan saran serta masukan dalam membantu pembuatan usulan penelitian ini ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS, MM selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II dan Pembimbing 1 yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mendengar, menginspirasi dan memberikan saran serta masukan dalam membantu pembuatan usulan penelitian ini.
7. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Publik.
8. Kak Bowo, Mba Ades dan Mba Ita selaku Admin Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini sering membantuku dalam semua urusan perkuliahan. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi bagian dari Tim Kuliah Tamu Jurusan Administrasi Publik 2018.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta para staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang sudah memberi pelajaran berharga serta membantu selama ini.
10. Ir. Hj. Atika Dewi (Bicik) yang selalu memberikan motivasi dan telah membantuku selama proses perkuliahan selama 8 semester ini.
11. Saudara-saudaraku, Alfariz Rahmatullah, Muhammad Altariq dan Adella Kirana Azzahra serta seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan doa untukku.
12. Seluruh kerabat dan sahabat penulis yang mendukung proses usulan penelitian ini, serta teman teman seperjuangan angkatan 2016 Administrasi Publik.
13. Mudhi'ah Safiq Hadiyati, Rizka Amalia, Ardan, Vinny serta semua sahabat terdekat yang pernah saya repotkan selama proses perkuliahan dan mengerjakan skripsi.
14. Dimas, Togi, Maulana, Hamas yang selalu menjadi inspirasi dan sahabat sepemikiran seputar dunia kampus.
15. Keluarga Besar dan Pengurus Wahana Kerohanian Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (WAKI FISIP UNSRI) serta Badan Pengurus Harian "#EksekusiBareng" yang menjadi gerbang awalku untuk membuka potensi diri lebih jauh lagi.

16. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya (HIMARA FISIP UNSRI) atas pengalaman dan kesempatan untuk belajar dan mendalami keadministrasian negara.
17. Keluarga Besar dan Jajaran BEM KM FISIP UNSRI Kabinet Magnetik 2018-2019 khususnya Dinas Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa yang mengizinkan saya untuk terus berproses, menahkodai dinas selama satu tahun kepengurusan dan menebar kebermanfaatan kepada para Mahasiswa. Terima kasih untuk narasi menjadikan Universitas Sriwijaya masuk Top 10 PTN Terbaik di Indonesia.
18. Bank Indonesia serta Keluarga Besar Generasi Baru Indonesia Sumatera Selatan (GenBI Sumsel) dan Kak Naufal yang telah memberikan kesempatan untuk merasakan pengalaman Leadership selama dan sesudah masa pemberian beasiswa. Teman-teman GenBI Komisariat Unsri 2020, Badan Pengurus Harian "Kontribusi Bersama", Ajeng, Inggit, Evan, Kiani, Anjas, Yuni, Rahmat, Nadya, Kiki dan Yasinta yang telah membersamai perjalanan untuk menahkodai selama satu tahun kepengurusan yang panjang.
19. Semua Pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sedari awal hingga penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Agustus 2020
Penulis

Andra Nuansa Agasta

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN .....
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
1. Manfaat Teoritis 10
2. Manfaat Praktis 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....
A. Landasan Teori 11
1. Keuangan Negara dan Daerah 11
2. Anggaran Sektor Publik 13
3. Pendekatan Penyusunan Anggaran 15
B. Anggaran Berbasis Kinerja 19
C. Penelitian Terdahulu 26
D. Kerangka Pemikiran 28

BAB III METODE PENELITIAN .....
A. Jenis Penelitian 30
B. Definisi Konsep 30
C. Fokus Penelitian 32
D. Unit Analisis Data 33
E. Data dan Sumber Data 33
F. Informan Penelitian 34
G. Teknik Pengumpulan Data 35
H. Teknik Analisis Data 37
I. Sistematika Penulisan 38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 40
1. Sejarah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 40
2. Tugas Pokok dan Fungsi
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 41
3. Visi dan Misi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 42
4. Struktur Organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 43

5. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bidang 44
6. Jumlah Pegawai 51
B. Analisis Penerapan Prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Program Sertifikasi Dosen di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 52
1. Tujuan 53
2. Ukuran Kinerja.....58
3. Kaitan 61
4. Akuntabilitas 64

BAB V PENUTUP 71
A. Kesimpulan.....71
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN 78

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Peningkatan Jumlah Dosen yang Bersertifikat Tahun 2018 6
Tabel 2. Perbandingan Realisasi Kinerja 2017-2018 7
Tabel 3. Perbedaan Skema Penyusunan Sasaran Strategis LLDikti Wilayah II Tahun 2018-2020 7
Tabel 4. Penelitian Terdahulu 26
Tabel 5. Fokus Penelitian 33
Tabel 6. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin 51
Tabel 7. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan 51
Tabel 8. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan 52
Tabel 9. Perjanjian Kinerja Peningkatan Kualitas Dosen di LLDikti Wilayah II Tahun 2020 55
Tabel 10. Tingkatan Proses Pengajuan Sertifikasi Dosen 59
Tabel 11. Revisi Anggaran Pelatihan Peningkatan Mutu dan Jumlah Dosen Bersertifikat Tahun 2020 63
Tabel 12. Hasil Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Program Sertifikasi Dosen di LLDikti Wilayah II Tahun 2020 69

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 23
Gambar 2. Konsep Kinerja dalam Perbedaan Sistem Anggaran 24
Gambar 3. Kerangka Pemikiran 29
Gambar 4. Struktur Organisasi LLDikti Wilayah II 44
Gambar 5. Perbandingan DIPA Kemenristekdikti dan Kemendikbud untuk Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 57
Gambar 6. Wawancara berkenaan Rencana Kerja LLDikti Wilayah II 58
Gambar 7. Indikator Kinerja pada Program Peningkatan Dosen Bersertifikasi 58
Gambar 8. Wawancara berkenaan Teknis Program Sertifikasi Dosen 60
Gambar 9. Mekanisme Penggunaan Anggaran Kegiatan di LLDikti Wilayah II 61
Gambar 10. Pelaksanaan Acara untuk Peningkatan Dosen yang Bersertifikasi di Lingkungan LLDikti Wilayah II 65
Gambar 11. Mekanisme Perencanaan Anggaran LLDikti Wilayah II 67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing Seminar Usulan Skripsi
2. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Surat Pengusulan Izin Penelitian
4. Surat Izin Penelitian
5. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Penelitian Skripsi Pembimbing I
6. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Penelitian Skripsi Pembimbing II
7. Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Seminar Usulan Skripsi
8. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Pembimbing II
9. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Penguji I
10. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Penguji II
11. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Revisi Seminar Proposal
12. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I
13. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II
14. Lembar Revisi Ujian Komprehensif Skripsi Pembimbing I
15. Lembar Revisi Ujian Komprehensif Skripsi Penguji I
16. Lembar Revisi Ujian Komprehensif Skripsi Penguji II
17. Pedoman Wawancara
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
22. Peraturan Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

DAFTAR SINGKATAN

1. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. BPKP : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
4. DIPA : Daftar Isian Pelaksana Anggaran
5. Kemendikbud : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Kemenristekdikti : Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
7. LAKIN : Laporan Kinerja
8. LLDikti : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
9. PK : Perjanjian Kinerja
10. PTN : Perguruan Tinggi Negeri
11. PTS : Perguruan Tinggi Swasta
12. Renja K/L : Rencana Kerja Kementrian/Lembaga
13. Renstra : Perencanaan Strategis
14. RKA : Rencana Kerja dan Anggaran
15. RKP : Rencana Kerja Pemerintah
16. SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
17. SOP : Standar Operasional Prosedur
18. Pusdiklatwas : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Salah satu bentuk usaha pemerintah Indonesia dalam mewujudkan prinsip *good governance* pada praktek implementasi birokrasi ialah memastikan bahwa setiap instansi bertanggung jawab untuk menunjukkan akuntabilitasnya. Akuntabilitas suatu instasi pada hakikatnya ialah tanggung jawab untuk memastikan tercapainya program kegiatan pemerintah dan mempertanggungjawabkannya pada rakyat. Masyarakat kini mulai kritis mempertanyakan akan nilai yang mereka dapatkan atas *service* yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah. Sehingga, tuntutan-tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik mampu menciptakan suatu pandangan baru yaitu prinsip *good governance*, termasuk didalamnya tentang nilai reformasi pada bidang dan keuangan serta penganggarannya.

Demi mewujudkan prinsip *good governance*, pemerintah membuat sistem perencanaan dan pelaporan berbasis kinerja yang diberi nama dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP. Dalam sistem ini, tiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kinerja pada setiap program dan penggunaan aset yang dimilliki. Termasuk pada tiap bagian dari instansi pemerintah, mulai dari satuan kerja, unit kerja, direktorat dan sebagainya yang harus menyediakan laporan secara kontinyu yang pada akhirnya dapat memberikan penjelasan spesifik tentang kinerja keseluruhan instansi tersebut. Penyusunan anggaran pada organisasi sektor publik memiliki proses yang panjang dalam perjalanannya. Karakteristik pada anggaran sektor publik tentu berbeda

dengan penganggaran pada sektor swasta. Pada sektor swasta anggaran merupakan rahasia umum perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk didiskusikan, dikritik maupun sebagai bahan evaluasi untik mendapat masukan. Sehingga hal ini sangat berguna bagi perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Pengelolaan keuangan negara di Republik Indonesia mengalami reformasi yang ditandai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal inilah yang memantik perubahan sistem anggaran dari Sistem Anggaran Tradisional (*Tradisional Budget System*) menjadi Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*). Lebih spesifik pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 membahas tentang penganggaran berbasis kinerja sebagai salah satu pendekatan dalam Penyusunan Rencana dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) yang mengintegrasikan proses perencanaan pembangunan dengan proses penganggaran.

Dalam proses transisi sistem ini tentu dilakukan secara bertahap yang dimulai pada tahun anggaran 2005 sampai 2010 dengan tahap implementasi proses reformasi sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004. Perubahan ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan dari sistem anggaran tradisional (*line item budgeting*) yang bersifat inkremental dan berbasis proses. Melalui pendekatan berbasis kinerja, diharapkan tidak ada lagi program dan kegiatan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah yang tak mempunyai tolak ukur kinerja sehingga perubahan ini akan menciptakan akuntabilitas dan tranparansi serta memberikan catatan besar pada pencapaian hasil dari kinerja pemerintahan. Beberapa kebijakan pemerintah

tersebut merupakan hal fundamental bagi reformasi di bidang keuangan negara, yaitu dari yang awalnya hanya sebatas administrasi keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan (*financial management*).

Penanggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based* Budgeting) saat ini sudah menjadi *trend* perkembangan di beberapa negara beriringan dengan munculnya manajemen publik baru (dalam Widyantoro, 2009). Di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk merancang dan mengelola anggaran berbasis kinerja. Artinya ialah tiap anggaran yang akan dikeluarkan harus digunakan untuk mencapai hasil tertentu, dimana setiap program kegiatan harus direncanakan sedemikian rupa demi hasil kerja yang diinginkan. Dari hal tersebut, visi organisasi sangat diperlukan dalam menunjang konsep besar perubahan penyusunan anggaran. Maka, program serta kegiatan wajib memiliki sasaran dan indikator yang akan mendukung untuk pencapaian visi dari suatu organisasi publik yang telah ditetapkan.

Anggaran berbasis kinerja (dalam Bastian, 2006) dibuat untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ada pada anggaran tradisional khususnya yang disebabkan karnea tidak adanya indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Indikasi keberhasilan anggaran berbasis kinerja adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang maju, pemerataan keadilan serta adanya *sound governance* antar pemerintah pusat dan daerah (dalam Prastowo, 2014: 525). Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkesinambungan akan memberikan *outcome* sehingga dapat dievaluasi dan dijadikan bahan pembelajaran untuk keberhasilan di masa yang akan datang.

Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan cara *Top-down* dan *Bottom-up*. Konsepnya ialah menitikberatkan pada cara mengaitkan setiap biaya yang dituangkan kedalam kegiatan-kegiatan dengan hasil (*output*) dan manfaat (*outcome*) yang akan dicapai. Baik kebijakan maupun program terlebih dahulu harus mengidentifikasikan tujuan, sasaran, tingkat sumber daya dan *outcome* pada rencana kerja yang akan ditetapkan. Susunan program pada tingkatan yang paling rendah harus berkaitan dengan rencana kerja lembaga secara umum, lalu lembaga mendeskripsikan tujuan, sasaran serta ukuran kinerja dalam kerjasama pada unit hierarki dibawahnya (dalam Mercer & John, 2002: 7).

Menurut Hager dkk (dalam Hermawan, 2011: 2) aspek yang sulit didalam penganggaran berbasis kinerja ialah menjelaskan target kinerja yang diukur secara handal dan teratur. Robinson (dalam Permana, 2012: 58) juga menyebutkan prakondisi yang harus dimiliki untuk penerapan *performance based budgeting* yaitu salah satunya adalah alat analisis dan evaluasi. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja ialah dengan mengkomparasikan beberapa hal berikut ini: kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang lebih unggul pada bidangnya atau kinerja sektor swasta dan kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain (internasional).

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II merupakan salah satu satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas dan fungsi pada bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai visi untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatifs, mandiri, beriman.

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebhinekaan global. Untuk mewujudkan hal tersebut maka program-program serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh LLDikti Wilayah II harus dapat mendukung dan selaras demi tercapainya visi tersebut. Maka sesuai dengan program Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, LLDikti Wilayah II juga mencanangkan visi untuk menjadi institusi yang berfungsi dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian demi terewujudnya perguruan tinggsi swasta yang bermutu dan memiliki daya saing.

Dalam Permenristekdikti No. 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemenristekdikti Tahun 2015-2019 dirumuskan berbagai acuan kerja kegiatan dan orientasi terhadap apa yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang ada atau mungkin timbul. Adapun Rencana Strategis tersebut diterjemahkan oleh LLDikti Wilayah II sebagai acuan untuk membuat Rencana Strategis 2015-2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai acuan kerja selama satu tahun anggaran.

Program Sertifikasi Dosen merupakan salah satu tugas utama yang dilakukan oleh Kementrian Riset dan Teknologi dalam upaya peningkatan mutu dosen yang berkualitas dan tersertifikasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan diatur bahwa dosen yang tersertifikasi minimal memliki jenjang jabatan akademik yaitu Asisten Ahli yang memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah 150 sesuai peraturan perundang-undangan.

Lingkup dari Sertifikasi Dosen tidak hanya sebatas pemberian tunjangan profesi sebagai bentuk apresiasi dan peningkatan kesejahteraan dosen saja. Lebih luas lagi,

sebelum dosen mendapatkan predikat sebagai dosen yang tersertifikasi, ada serangkaian proses-proses serta kegiatan yang dirancang sebelumnya yang dilaksanakan oleh LLDikti Wilayah II. Program serta kegiatan ini berbentuk seperti sosialisasi, pelatihan serta workshop yang diadakan dan dihadiri oleh para dosen baik yang belum tersertifikasi ataupun yang sudah tersertfikasi. Hal ini dilakukan demi mencapai indikator keberhasilan peningkatan jumlah dosen yang tersertifikasi di lingkup wilayah kerja LLDikti Wilayah II.

Tabel 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Peningkatan Jumlah Dosen yang Bersertifikat Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan (%)
Peningkatan jumlah dosen yang Berkualitas dan Bersertifikasi yang Meningkatkan Kualitas Dunia Pendidikan	Jumlah/Presentase Dosen Bersertifikat Pendidik di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II	703.154.000	626.848.800	89,15

Sumber: Diolah Penulis dari Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah II, 2018

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 703.154.000 sedangkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp 626.848.800 dengan presentase sebesar 89,15%. Ada 3 program pelaksanaan yang masuk ke dalam sasaran peningkatan jumlah dosen yang bersertifikasi yaitu:

1. Sosialisasi Sertifikasi Dosen bagi Dosen yang Belum Disertifikasi (Sumatera Selatan) mencapai 90,11% dari 617 peserta diundang, hanya dihadiri 556 peserta dari pelaksanaan dipalembang.
2. Workshop Jenjang Jabatan Akademik (JJA) bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta mencapai 100% dari 315 orang yang dilaksanakan di Palembang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Pangkal Pinang.

3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan mencapai 83,62% dari 354 peserta yang diundang, dihadiri 296 orang yang dilaksanakan di Palembang.

Tabel 2. Perbandingan Realisasi Kinerja 2017 – 2018

Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2015-2019	Realisasi 2017	Tahun 2018		
				Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya ilmu pengetahuan dan pendidikan tinggi	Persentase Dosen Bersertifikat Pendidik	22,45%	16,58%	26,7%	24,63%	124,6%

Sumber: Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah II Tahun 2018

Berdasarkan data diatas, pada sasaran strategis peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi, diketahui bahwa presentase dosen bersertifikat pendidik mencapai realisasi sebesar 124,6% dari target yang ditetapkan di Rencana Strategis 2015-2019. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat proses ataupun program yang berhasil dilakukan oleh LLDikti Wilayah II dalam menunjang peningkatan dosen bersertifikat pendidik pada tahun 2018.

Tabel 3. Perbedaan Skema Penyusunan Sasaran Strategis LLDikti Wilayah II Tahun 2018-2020

	2018	2019	2020
Sasaran Strategis	Peningkatan jumlah dosen yang berkualitas dan bersertifikasi yang meningkatkan kualitas dunia pendidikan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Meningkatnya kualitas lulusan, dan dosen, serta kurikulum dan
Indikator Kinerja	Jumlah/Persentase Dosen Bersertifikat Pendidik di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II	Persentase Dosen PTS yang Bersertifikasi Pendidik	a. Persentase Dosen tetap yang melaksanakan kegiatan tridharma dikampus lain, berkolaborasi dengan QS500 dan/atau bekerja

			sebagai praktisi min. 6 bulan selama 5 tahun terakhir (bersifat kumulatif b. Persentase Dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki Sertifikasi Kompetensi yang diakui industry & Dunia Kerja, dan/atau berasal dari kalangan praktisi profesional atau industri
Komponen	a. Sosialisasi Sertifikasi Dosen bagi Dosen yang Belum Disertifikasi (Palembang) b. Workshop Jenjang Jabatan Akademik (JJA) bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta (Palembang, Bengkulu, Bandar Lampung dan Pangkal Pinang) c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	a. Beban Kinerja Dosen (Palembang dan Bandar Lampung) b. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) bagi Dosen di Lingkungan LLDikti Wilayah II di Palembang	
Target	1. 617 peserta 2. 315 peserta 3. 354 peserta	1. 2 kegiatan 2. 1 kegiatan	1. 20 % 2. 40%

Sumber: Diolah Peneliti dari LAKIN 2018-2019 dan PK LLDikti Wilayah II 2020

Pada tahun 2018-2019, pelaksanaan program kegiatan untuk peningkatan dosen yang tersertifikasi mengalami pencapaian target yang cukup realistis dari yang telah direncanakan. Namun pada tahun 2020 terdapat perubahan dalam struktur ketatanegaraan mengenai hak dan wewenang yang menaungi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementrian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 yang membuat tanggung jawab Pendidikan Tinggi yang sebelumnya dibawah Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kembali dibawahi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ditambah juga dengan penyesuaian Rencana Strategis Kementrian/Lembaga untuk periode 2020-2024.

Dilihat dari pencapaian serta identifikasi masalah LLDikti Wilayah II harus memiliki sistem penyusunan anggaran yang relevan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah ditetapkan pemerintah. Korelasi antara rencana strategis, sasaran strategis maupun program harus selaras demi tercapainya peningkatan kualitas tenaga pendidik khususnya dosen yang bersertifikasi. Ditambah, bentuk antisipasi dan prosedur yang akan dilakukan oleh LLDikti Wilayah II dalam menyesuaikan perubahan struktur kementerian diatasnya.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, peneliti akan mengkaji dan menganalisa program peningkatan dosen yang bersertifikasi melalui prinsip penganggaran berbasis kinerja dengan judul "Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Program Sertifikasi Dosen di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Tahun 2020"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis merumuskan masalah skripsi ini sebagai berikut:

"Bagaimana penerapan prinsip-prinsip penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Program Peningkatan Dosen yang Bersertifikasi di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II (LLDikti Wilayah II) Tahun 2020?"

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

"Untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja pada program dan kegiatan yang dilaksanakan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II terkait upaya peningkatan jumlah dosen yang bersertifikasi."

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi pada jurusan Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan konsentrasi Keuangan Negara mengenai Anggaran Berbasis Kinerja.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan bagi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II serta semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran, rencana kerja tahunan dan pelaksanaan program terkait peningkatan dosen bersertifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Yunita dan B. Hendra Puranto. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN

Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Diamond, Jack. 2005. *Establishing a Performance Management Framework Government.* IMF Working Paper

Halim, Abdul. 2007. *Akuntasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Munandar, M. 2007. *Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Yogyakarta: BPFE

Nordiawan. Dedi, dkk. 2009. *Akuntansi Pemerintahan.* Jakarta: Salemba Empat

Paterson, dkk. 2010. *Perencanaan, Pengeluaran dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) pada Direktorat Jenderal Bina Marga*. Jakarta: Indonesia Infrastructure Initiative

Singarimbun, Masri dan Effendi. 2016. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sukardi, 2003. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Suparmoko. 2011. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE

Ulber, Silalahi. 2009. *Metotde Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama

Yuwono. Sony, dkk. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: Bayumedia Publishing

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Skripsi

Akmal, Imadudin. 2018. *Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maros)*. Makassar: Universitas Hasanuddin

Permana, Ryan. 2012. *Analisis Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja; Studi Kasus Pada Universitas Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia

Tesis

Hermawan, Erry. 2011. *Analisis Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja di Lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan Sekretariat Negara RI.*. Jakarta: Universitas Indonesia

Widyantoro, Ari Eko. 2009. *Implementasi Performanced Based Budgeting: Sebuah Kajian Fenomenologis (Studi Kasus Pada Universitas Diponegoro)*. SemarangL Universitas Diponegoro

Sumber Jurnal

Hesrini, Elly. 2015. *Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gresik*. E-Jurnal Ilmu Manajemen MAGISTRA, 1 (1): 56-70

Masengi, Evi. 2006. *Kebijakan Penganggaran di Era Otonomi Daerah*.. Jurnal Eksekutif 5 (2): 293-302

Prastowo, Agung. 2014. *Penerapan dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja*. Jurnal Administrasi Publik, 6 (2)

Dokumen

Laporan Akuntabilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Tahun 2017

Laporan Kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Tahun 2018

Laporan Kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Tahun 2019

Perjanjian Kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Tahun 2020

Wakhyudi, Theresia. 2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan